

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia merupakan salah satu tujuan penting bagi negara. Kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama negara juga termasuk dalam ideologi sekaligus dasar Negara Indonesia, yakni Pancasila. Dalam konsep kesejahteraan, subjek serta objek utamanya merupakan masyarakat. Artinya, kesejahteraan diciptakan oleh rakyat dan ditujukan untuk rakyat. Lebih sempit nya, aktor yang berperan sebagai penentu kesejahteraan adalah manusia atau individu. Oleh sebab itu, manusia atau individu sering dipandang sebagai aset bagi negara. Individu menjadi aktor sekaligus sasaran kesejahteraan. Tujuan perwujudan kesejahteraan adalah untuk membentuk suatu kehidupan yang layak bagi masyarakat.

Kehidupan yang layak tentunya akan mendorong lancarnya pelaksanaan fungsi sosial oleh individu. Hal ini dikarenakan individu dapat mengembangkan potensi dirinya. Kesejahteraan masyarakat sendiri dapat diukur dari tingkat kemakmuran, maksudnya masyarakat bari dapat dikatakan sejahtera apabila ia telah makmur. Ukuran lain bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat diantaranya adalah kondisi sosial ekonomi, kesehatan dan harapan hidup, kualitas lingkungan, serta kondisi emosional seperti kebahagiaan. Dengan kata lain, kesejahteraan muncul jika masyarakat memiliki tanda-tanda kehidupan yang nyaman, aman, sentosa, serta dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hasan Muhamad, Azis Muhamad. PEMBANGUNAN EKONOMI & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal (Makasar : Pustaka Taman Ilmu, 2018)hlm. 4

Manusia sendiri memiliki banyak kebutuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Salah satu diantara kebutuhan manusia adalah kebutuhan dasar, atau yang sering disebut sebagai kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan primer terdiri kebutuhan akan sandang yakni berupa pakaian, pangan yakni berupa makanan, dan papan yakni berupa tempat tinggal. Sementara kebutuhan sekunder adalah kebutuhan lain yang melengkapi proses pengembangan diri manusia, seperti kebutuhan mendapatkan pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan lainnya. Kebutuhan sekunder dapat dikatakan masih berhubungan erat dengan kebutuhan primer dan melengkapinya. Sesuai dengan yang dibahas pada paragraf sebelumnya, salah satu tanda masyarakat sejahtera adalah dapat memenuhi kebutuhannya. Artinya, masyarakat dapat dikatakan sejahtera apabila unsur primer dan sekundernya sudah terpenuhi dengan baik. Alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adalah pembangunan sosial. Keberhasilan suatu pembangunan sosial dititik beratkan pada kualitas manusia atau individunya. Semakin sumber daya manusia dalam suatu negara baik maka negara tersebut dapat dianggap berhasil melakukan pembangunan sosial. Untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah mencanangkan program pembangunan sosial yang terfokus pada kualitas sumberdaya manusianya. Tujuannya tidak lain adalah agar tiap-tiap individu dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan perlahan mencapai kesejahteraan secara mandiri.

Skema diatas merupakan suatu skema yang cukup sederhana. Apabila pemerintahan meningkatkan kualitas hidup individu, maka individu tersebut dapat meningkatkan kualitas hidupnya, selanjutnya taraf hidup masyarakat akan menjadi lebih baik dan kesejahteraan dapat tercapai. Program Harapan Keluarga atau

disingkat PKH merupakan salah satu program pembangunan sosial yang terfokus pada peningkatan sumberdaya manusia. Dalam hal ini keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Program PKH merupakan program pemerintah Indonesia yang sudah berjalan selama hampir 15 tahun sejak 2007. Meskipun sempat mandek, pemerintah Indonesia memutuskan untuk melanjutkan program pemberdayaan PKH pada tahun 2014 silam.<sup>2</sup>

Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah yang ikut melanjutkan program PKH pada tahun 2014. Kecamatan ini juga merupakan salah satu daerah yang menjadi sasaran kesejahteraan di Kabupaten Bekasi, sehingga Cabangbungin menjadi kecamatan yang aktif menyelenggarakan program PKH. Alasan Kecamatan Cabangbungin menjadi sasaran program PKH adalah dikarenakan daerah tersebut menjadi salah satu daerah yang masih terjebak dalam permasalahan kemiskinan di Kabupaten Bekasi. Cabangbungin memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Hal ini pun selaras dengan kualitas sumberdaya manusia yang kurang baik sehingga patut menjadi sasaran program pembangunan sosial.

Tingkat kesejahteraan di Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi salah satunya dapat di lihat dari indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Bekasi yang meningkat dari 0,60 menjadi 0,72 sepanjang tahun 2019–2020. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran tiap penduduk miskin relatif terhadap garis kemiskinan semakin melebar. Garis kemiskinan Kabupaten Bekasi tahun 2019–2020 adalah Rp.481.732 dan Rp. 518.667 per kapita per bulan. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Bekasi periode 2019–2020 juga meningkat, dari

---

<sup>2</sup> Zubaedi. Pengembang Masyarakat Wacana dan Praktik, ( Jakarta, Kecana Prenada Media Group, 2016). hlm 21

0,15 menjadi 0,18. Distribusi pengeluaran penduduk miskin digambarkan dengan indeks keparahan kemiskinan. Ketimpangan pengeluaran masyarakat miskin meningkat dengan meningkatnya nilai indeks. Dengan meningkatnya indeks kemiskinan artinya tingkat kesejahteraan penduduk menurun, maka pemerintah di Kecamatan Cabangbungin menggunakan PKH sebagai salah satu solusi.<sup>3</sup>

Sasaran utama Program Keluarga Harapan (PKH) adalah masyarakat dengan tipe Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Program pembangunannya sendiri berupa pemberian bantuan tunai pada masyarakat yang memenuhi kriteria, yakni mereka yang tergolong ke dalam keluarga dengan tipe RTSM. Dengan memberikan bantuan secara tunai, pemerintah mengharapkan penerima bantuan dapat memanfaatkan bantuan tersebut untuk meningkatkan kualitas hidupnya dari segi pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Karena sifatnya yang merupakan program pemberian bantuan tunai, serta tujuannya yang dikhususkan untuk peningkatan kesejahteraan, PKH juga dapat disebut sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan. Pemerintah juga menyebutkan bahwa PKH memiliki kedudukan yang sejajar atau sama dengan program penanggulangan kemiskinan lainnya. Hal ini juga yang menjadi landasan mengapa PKH dikelola oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).<sup>4</sup>

Selain berperan sebagai media penanggulangan kemiskinan, PKH juga berperan sebagai program untuk melaksanakan perlindungan sosial bagi masyarakat. Dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan dan pelaksanaan perlindungan sosial oleh pemerintah, PKH memiliki syarat-syarat tertentu. Hal

---

<sup>3</sup> Sumber data Desa Cabangbungin, 2021

<sup>4</sup> Heru Dwi Sukoco *Mari Kita Mengenal Program PKH*. Sumber wacana: kemensos. Co.id diakses tanggal 12 April 2016

tersebut ditujukan agar program tidak salah sasaran dan dapat mencapai tujuannya dengan baik. Syarat atau kualifikasi umum dari penerima PKH adalah Keluarga Sangat Miskin (KSM) atau keluarga dengan tipe Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Adapun dari syarat tersebut, terdapat penjelasan lanjutan, yakni keluarga Harapan (PKH) telah mampu memberi harapan kepada semua pihak, terutama dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga yang sangat kesulitan ekonominya, kurang dapat memenuhi kebutuhan seharinya, atau dapat dikatakan keluarga dengan ekonomi yang goncang (tidak stabil). Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai perlindungan sosial yang berupaya memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak memiliki kekuatan, sehingga diperlukan penguatan atau pemberdayaan agar warga tersebut memiliki daya untuk keluar dari lingkaran kemiskinannya.<sup>5</sup>

Sebelum peneliti melakukan penelitian, peneliti telah melakukan studi pendahuluan dengan metode pengamatan atau observasi di Kecamatan Cabangbungin. Hasil pengamatan selama beberapa pekan menunjukkan bahwa masyarakat di daerah Kecamatan Cabangbungin memiliki antusias yang tinggi untuk menerima program PKH. Karena banyaknya peminat, maka mereka yang tidak sesuai dengan persyaratan PKH menjadi cemburu dengan masyarakat lain yang menerima PKH. Fenomena tersebut selanjutnya dapat dikatakan sebagai gejala kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial di daerah Kecamatan Cabangbungin mengakibatkan munculnya desas-desus yang menyatakan bahwa

---

<sup>5</sup> Kajian Program Keluarga Harapan, <https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/cf871a82-6692-4206-93a0-9f88a66c5756>. 2015.hlm 39

pemerintah tidak mampu membedakan masyarakat sesuai kriteria RTSM atau KSM. Masyarakat beranggapan bahwa para penerima PKH sebenarnya tidak termasuk ke dalam kriteria tersebut. Salah satu desa di Cabangbungin yang juga mengalami masalah kecemburuan sosial akibat PKH adalah desa Lenggah Jaya. Masyarakat di Desa Lenggah Jaya Kecamatan Cabangbungin menduga bahwa mereka yang termasuk ke dalam tipe RTSM atau KSM tidak mendapatkan haknya, sehingga penyaluran program PKH di Lenggah Jaya dapat dipastikan belum tepat sasaran. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di desa tersebut belum sesuai prosedur.

Tingkat keluarga miskin yang tinggi di Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi salah satunya terletak di Desa Lenggah Jaya. Masyarakat Desa Lenggah Jaya secara sosial dan ekonomi masih tergolong kepada masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan rendah dibanding dengan desa lainnya. Kemiskinan di Desa Lenggah Jaya selain dipengaruhi oleh pendapatan, juga berasal dari aspek kesehatan dan akses pada pelayanan kesehatan yang relatif rendah. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, masyarakat di Desa Lenggah Jaya belum sepenuhnya sadar akan pentingnya kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah harus mengefektifkan program perlindungan sosial khususnya untuk gizi ibu hamil, ibu nifas, lansia, dan balita. Permasalahan berikutnya adalah masalah tingkat pendidikan anak dari Keluarga Sangat Miskin (KSM). Meskipun telah ada berbagai langkah pemerintah untuk membantu mempermudah akses pendidikan, tingkat partisipasi sekolah masih belum optimal, terutama bagi anak-anak muda, dan ini terutama berlaku di Desa Lenggah Jaya.

Misi Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk membangun jaring perlindungan sosial bagi keluarga berpenghasilan rendah di Indonesia, khususnya dalam hal ini di masyarakat Lenggah Jaya. Namun, terlepas dari berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sistem kesejahteraan Indonesia tetap menjadi momok yang belum tuntas diselesaikan. Hal ini salah satunya adalah permasalahan yang muncul saat peluncuran Program Keluarga Harapan PKH bagi Keluarga Berpenghasilan Sangat Rendah (KSM). Sebagai inisiatif lanjutan pada tahun 2014, PKH seharusnya berpotensi memberikan pengaruh positif dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Sebaliknya, PKH justru menimbulkan permasalahan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.<sup>6</sup>

Sekretaris Desa Lenggah Jaya mengklaim upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah sejauh ini justru gagal. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa peran pemerintah pada dasarnya terdiri dari memberikan selebaran kepada rakyat, tanpa melakukan pengawasan yang cukup untuk memastikan bahwa uang yang diberikan harusnya dimanfaatkan dengan baik. Sementara beberapa penerima tidak jujur dengan uang bantuan mereka, program penyaluran dana bantuan oleh pemerintah sejauh ini efektif, dan masyarakat telah mendapat manfaat darinya.

Menanggapi pernyataan Sekretaris Desa Tersebut penulis memahami bahwa terdapat masalah dalam pelaksanaan Program Pemerintah Di Desa Lenggah Jaya. Berdasarkan masalah tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa sejauh mana efektifitas program keluarga harapan di pedesaan dalam meningkatkan

---

<sup>6</sup>*Ibid.* Kajian Program Keluarga Harapan.hlm 42

kesejahteraan masyarakat. Adapun penelitian ini dilakukan di Desa Lenggah Jaya Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi. Untuk itu, penulis akan menarik judul penelitian “**Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**” (Studi Deskriptif Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lenggah Jaya Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi).

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan masalah-masalah yang telah diuraikan pada poin latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan beberapa masalah inti yang teridentifikasi sebagai berikut:

1. Kesadaran masyarakat dengan status Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) akan pentingnya pendidikan masih dalam tingkat yang relatif rendah, sehingga menyebabkan terjadinya kasus putus sekolah di Desa Lenggah Jaya.
2. Selain pendidikan, masyarakat dengan status RTSM juga masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah terhadap pentingnya menjaga kesehatan.
3. Masalah pendidikan dan ekonomi yang dimiliki masyarakat Lenggah Jaya merambat ke permasalahan kurangnya masyarakat meningkatkan pendapatan ekonomi dan taraf hidupnya.
4. Pemerintah Desa Lenggah Jaya dapat dikatakan masih kurang berhasil dalam menyaring masyarakat dengan status Keluarga Sangat Miskin atau Rumah Tangga Sangat Miskin, sehingga penyaluran dana bantuan justru kurang efektif.
5. Penyaluran dana bantuan dari Program Keluarga Harapan yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan dan melakukan peningkatan kesejahteraan sosial justru menimbulkan masalah kecemburuan sosial dari mereka yang bukan peserta Program Keluarga Harapan.



6. Pemerintah Desa dan segenap penanggung jawab Program Keluarga Harapan di Desa Lenggah Jaya kurang menyediakan sarana dan prasarana sosialisasi terkait PKH.

### **C. Rumusan Masalah**

Setelah mengidentifikasi masalah penelitian dari latar belakang penelitian, maka selanjutnya peneliti akan menguraikan beberapa rumusan masalah atau pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi Pemerintah Desa Lenggah Jaya dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui Program Keluarga Harapan?
2. Apa upaya penanggulangan kecemburuan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lenggah Jaya akibat adanya Program Keluarga Harapan?
3. Bagaimana kondisi kesejahteraan penduduk di Desa Lenggah Jaya setelah strategi peningkatan kesejahteraan melalui PKH dan penanggulangan kecemburuan sosial dilakukan?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab oleh penelitian ini, maka selanjutnya penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi Pemerintah Desa Lenggah Jaya dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui Program Keluarga Harapan.
2. Untuk mengetahui penanggulangan kecemburuan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lenggah Jaya akibat adanya Program Keluarga Harapan.
3. Untuk mengetahui kondisi kesejahteraan penduduk di Desa Lenggah Jaya setelah strategi peningkatan kesejahteraan melalui PKH dan penanggulangan kecemburuan sosial dilakukan.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### **Kegunaan Praktis**

Tujuan dari penelitian ini secara praktis adalah untuk memberikan gambaran dari program pembangunan dan pemberdayaan sosial yang digagas oleh pemerintah Indonesia. Salah satu program tersebut merupakan Program Keluarga Harapan (PKH), yakni program yang mewadahi masyarakat Indonesia dalam mencapai kesejahteraannya di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan bidang sosial lainnya. Penelitian ini juga ditujukan untuk membantu mahasiswa, khususnya yang mengambil jurusan sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dalam mengembangkan pemahaman dan kepekaan sosial tentang tantangan yang dihadapi masyarakat pedesaan dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

### **Kegunaan Teoritis**

Diharapkan penelitian ini akan berkontribusi secara signifikan terhadap kemajuan pengetahuan ilmiah di sektor sosial masyarakat, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang berada di lingkungan pedesaan. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan penelitian lebih lanjut untuk tujuan penyelidikan dan analisis masalah kesejahteraan yang lazim terjadi di masyarakat pedesaan. Hal ini khususnya di Desa Lenggah Jaya yang terletak di kecamatan Cabangbungin di Kabupaten Bekasi, ataupun desa-desa pada umumnya di seluruh Indonesia.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Kesehatan, kemakmuran ekonomi, perasaan bahagia secara subjektif, dan ketersediaan kebutuhan dasar adalah indikator kesejahteraan. Ketika seorang individu atau masyarakat memiliki lingkungan yang aman dan makmur di mana mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, maka mereka akan dianggap telah sejahtera. Untuk memenuhi kebutuhan dasar dan sekunder sebagai sarana penghidupan. Kebutuhan paling mendasar bagi manusia adalah kebutuhan hidup yakni kebutuhan akan pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Manusia juga membutuhkan pendidikan dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya secara finansial dan memenuhi kebutuhan yang lain. Oleh karena itu, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, perlu untuk memastikan bahwa aspek paling mendasar dari pertumbuhan manusia terpenuhi. Dengan demikian, jika aspek paling mendasar dari manusia terpenuhi, maka masyarakat secara keseluruhan akan berkembang.

Kondisi sumber daya yang tersedia (baik manusia maupun alam) merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu pembangunan. Program pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warganya, dan salah satu tujuan tersebut adalah pembangunan manusia. Kualitas hidup yang lebih baik inilah yang meningkatkan standar hidup semua orang. Tingkat pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah tanda-tanda bahwa sumber daya manusianya telah baik. Keluarga penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang diusulkan pemerintah akan memiliki akses ke berbagai pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan masyarakat. Hal tersebut ditekankan khusus pada pengembangan sumber daya manusia. Tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah berupaya

mengubah perilaku dan pemikiran keluarga peserta PKH tentang kesehatan anak dan ibu hamil, serta jenjang pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari rumah tangga yang sangat miskin, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun meskipun demikian, terkadang kebijakan atau misi yang baik tidak memenuhi aspirasi atau harapan yang ingin diwujudkan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kemiskinan struktural yang ada di dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Kemiskinan struktural dan ketidakberhasilan program pemberdayaan bisa terikat satu sama lain. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan terjadi pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh pemerintah Indonesia. Salah satu masalah program ini adalah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Masalah tersebut akhirnya menyebabkan permasalahan lain, yakni terhambatnya percepatan kesejahteraan masyarakat dan timbulnya kecemburuan sosial. Sebagian besar keluarga miskin yang mendapatkan bantuan PKH untuk pendidikan anak-anak mereka justru menggunakan uang itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Terkadang penerima bantuan membelanjakan uang untuk barang-barang yang tersier seperti smartphone, televisi, dan elektronik lainnya. Oleh karena itu, program-program anti-kemiskinan membutuhkan strategi yang mencakup semua, sinergis, dan jangka panjang. Pemerintah perlu meninjau kembali masalah pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah, kesehatan yang buruk, dan kurangnya akses ke perumahan, pakaian, dan makanan.

Berbagai contoh penyelewengan uang bantuan PKH yang telah dirinci dalam paragraf sebelumnya, merupakan faktor yang memperlihatkan bahwa program tersebut tidak beroperasi seefektif yang seharusnya. Dari perspektif Teori

---

<sup>7</sup> Buku pedoman PKH, (2007:6)

Struktural Fungsional Talcott Parson, hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diusulkannya. Semua sistem sosial, membutuhkan kehadiran empat fungsi inti yakni fungsi AGIL. Seperti yang diuraikan oleh Parson fungsi AGIL adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

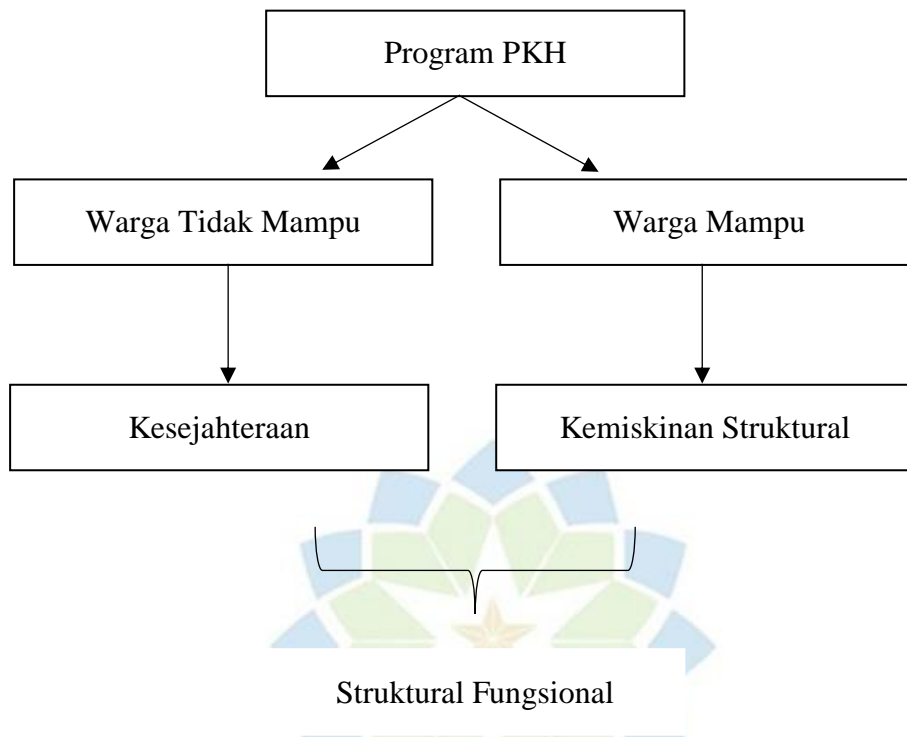
1. *Adaptation* atau adaptasi merupakan fungsi dimana sebuah sistem menyesuaikan dirinya dengan situasi yang mengancam dan bersifat gawat. Dengan kata lain, sebuah sistem menyelesaikan permasalahan yang bersifat eksternal maupun internal dengan cara menyesuaikan diri (beradaptasi). Hal ini dilakukan agar sistem tetap dapat memenuhi kebutuhannya dan tetap berjalan seimbang (*equilibrium*).
2. *Goal attainment*, fungsi kedua yang digagas Parsons dalam Teori Struktural Fungsionalnya adalah fungsi pencapaian tujuan. Fungsi dimaksudkan pada peran sistem yang harus mampu menentukan tujuan-tujuan serta cara atau teknik yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut.
3. *Integration*, fungsi ketiga adalah fungsi integrasi. Yang berintegrasi disini adalah semua unsur sistem sosial yakni struktur atau subsistem. Mereka harus saling menyesuaikan diri, bekerjasama dan bersatu sehingga tujuan sistem dapat dicapai dengan baik. Tugas sistem harus mampu mengelola struktur-struktur serta fungsi lainnya yaitu A, G, L agar dapat terintegrasi satu sama lain.
4. *Latency*, laten berarti sebuah sistem harus mampu melacak pola individu dan budaya, serta motivasi mereka, dan sistem harus dapat mengelola, merawat, dan meningkatkan pola-pola itu.

---

<sup>8</sup> George Ritzr, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana, 2007), 121

Talcott Parson menciptakan skema AGIL untuk membahas empat sistem aksi di berbagai tingkatan sistem teoritisnya. Tindakan atau aksi yang dimaksud oleh Parson menunjukkan skema AGIL. Pertama, organisme perilaku adalah sistem perilaku yang beradaptasi dengan lingkungannya. Kedua, sistem kepribadian mencapai tujuan sistem dengan memobilisasi sumber daya. Ketiga, sistem sosial mengontrol komponen-komponennya untuk mengatasi integrasi. Keempat, sistem kebudayaan menerapkan pola dengan memotivasi agen dengan norma dan nilai.





**Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran**